

Original Research

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah

The Effect of Regional Original Income, Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Capital Expenditure Allocations in Central Kalimantan Province

Paulus Yudi Hermawan^{1,*}, Harin Tiawon¹, Sunaryo Neneng¹

¹ Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya. Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jl. Yos Sudarso Palangka Raya, Indonesia, 73111

* Korespondensi: Paulus Yudi Hermawan (Email: hermawan2503@gmail.com)

<https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem>

<https://doi.org/10.37304/jem.v2i3.4385>

Received: 2 September 2021

Revised: 11 September 2021

Accepted: 14 September 2021

Abstract

The era of autonomy has a logical consequence of the broad distribution of budgetary resources among local governments. It is expected that the optimization of the initial revenues of local governments, the distribution of the budget, general funds and special funds will have an impact on capital expenditures. The objective of this study was to analyze the impact of local governments' original revenue, budget sharing, general allocation fund, and special allocation fund on capital expenditure in Central Kalimantan province using time series data 2009-2017 and a cross-section of 13 districts and 1 city. The research approach is descriptive and quantitative and uses secondary data collected from the Central Statistics Office (BPS) of Central Kalimantan Province. Multiple linear regression with IBM SPSS version 25.0 is used for hypothesis testing. The results of the study show that some of the original local government revenues do not have a positive and significant impact on capital expenditures, while the common budget, general allocation funds, and special allocation funds have a positive and significant impact on capital expenditures. At the same time, local government revenue, common budget, general allocation funds and special allocation funds have a positive and significant impact on capital expenditures in Central Kalimantan province for the period 2009-2017. It is suggested that the local government should optimize its own revenue, especially from local resources covered by regulations, and also effectively focus on basic needs and public service sectors such as capital stock and infestation.

Keywords

Local government revenue, sharing budget, general allocation funds, and special allocation funds

Intisari

Era otonomi memiliki konsekuensi logis berupa distribusi sumber daya anggaran yang luas di antara pemerintah daerah. Optimalisasi pendapatan awal pemerintah daerah, penyaluran anggaran, dana umum dan dana khusus diharapkan berdampak pada belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, anggaran bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan data time series 2009-2017 dan cross section 13 kabupaten dan 1 kota. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Regresi linier berganda dengan IBM SPSS versi 25.0 digunakan untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan anggaran umum, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, pendapatan daerah, anggaran umum, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2009-2017. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, terutama dari sumber daya daerah yang diatur dalam peraturan, dan juga secara efektif fokus pada kebutuhan dasar dan sektor pelayanan publik seperti modal dan investasi.

Kata kunci

Pendapatan pemerintah daerah, anggaran bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah daerah pada umumnya bermanfaat dalam membuat kebijakan atau peraturan terkait dalam urusan pemerintahan di dalam daerah itu sendiri. Tapi pada kenyataan di lapangan dalam pelaksanaan otonomi daerah ini membuat timbulnya banyak permasalahan baru, seperti: kewenangan berlapis, masalah pelayanan publik, masalah kekuasaan, problem pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah langsung dan problematika anggaran. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat masalah tentang anggaran yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, terkadang pemerintah daerah tidak mempunyai anggaran yang cukup. Seperti tertulis dalam undang-undang nomor 3 tahun 2004 bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negera (APBN), dana ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar pemerintah-daerah untuk membiayai kebutuhan dimasing-masing pemerintah daerah.

Rifai (2017) mengemukakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Lebih lanjut, Banga (2017) mengemukakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya dapat mengubah komposisi belanjanya yaitu dengan mengurangi proporsi anggaran belanja rutin yang relatif kurang produktif kepada proporsi anggaran yang produktif, seperti memprioritaskan pada program dan kegiatan pembangunan untuk layanan dasar publik dan menyentuh kepentingan umum.

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka DBH adalah pengalokasian dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Dana bagi hasil dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, DBH sumber daya alam dan DBH pajak.

Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Fakta ini dapat dilihat dari peranannya dalam mendanai kebutuhan pembangunan di daerah dalam era desentralisasi dalam mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah. DAU diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien sebagai sumber pembiayaan pembangunan untuk pelayanan pada masyarakat melalui belanja modal sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pemberian DAU bertujuan untuk pemerataan pembangunan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan.

Dana alokasi khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Selain itu juga, DAK dapat digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa DAK mempunyai pengaruh yang besar sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan untuk belanja modal pemerintah daerah yang bersumber dari pemerintah pusat.

Perkembangan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode tahun 2009-2017 menunjukkan trend yang fluktuatif. Perkembangan variabel pendapatan asli daerah yang menunjukkan trend menurun dari Rp. 1,253 Triliun (2014), menjadi Rp. 1,174 Triliun (2015) dan Rp. 1,154 Triliun (2016) secara berturut-turut sehingga dapat berpengaruh terhadap penurunan alokasi belanja modal, sedangkan di sisi lain alokasi dana bagi hasil menunjukkan trend meningkat dalam waktu dua tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 320,2 Milyar (2015), menjadi Rp. 342,8 Milyar (2016), dan Rp. 372,4 Milyar (2017), disusul oleh variabel dana alokasi umum menunjukkan trend meningkat dalam waktu sembilan tahun terakhir yaitu dari Rp. 694,8 Milyar (2009) menjadi Rp. 1,574 Triliun (2017), demikian juga dengan dana alokasi khusus yang menunjukkan trend meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 61,92 Milyar (2014), menjadi Rp. 72,52 Milyar (2015), Rp. 241,2 Milyar (2016), dan Rp. 641,5 Milyar (2017) secara berturut-turut sehingga diperkirakan dapat berpengaruh terhadap peningkatan alokasi belanja modal yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode tahun 2009-2017.

Beberapa hasil kajian empiris sebelumnya tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal menunjukkan hasil yang beragam. Andriana (2012) menemukan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2007. Sari dan Wirama (2018) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Kajian empiris tentang pengaruh dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal dilakukan oleh Sudrajat dan Purniawati (2017) menyimpulkan bahwa secara parsial dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten Ngawi. Kholidi et al. (2018) menunjukkan bahwa dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Juniawan dan Suryantini (2018) menyimpulkan bahwa secara parsial dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Demikian juga, Suryana (2018) menyatakan bahwa secara parsial dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota.

Kajian empiris tentang pengaruh dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Aditiya dan Dirgantari, 2017). Demikian juga, Rifai (2017) menyimpulkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kajian empiris tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal dilakukan oleh menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Jannah et al., 2017). Sari (2018) menyimpulkan bahwa secara parsial DAU, DAK, DBH dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Tantangan ke depan yang dihadapi daerah dalam penyediaan alokasi anggaran adalah bagaimana agar dapat tetap menyediakan kebutuhan dasar dan pelayanan publik ditengah keterbatasan anggaran yang dimiliki, baik melalui PAD dan dana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan alokasi belanja modal. Untuk itu diperlukan strategi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien mungkin agar alokasi belanja modal dapat tepat sasaran untuk kegiatan yang menjadi aset.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode tahun 2009-2017. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi dalam pengelolaan penerimaan daerah ditengah keterbatasan anggaran yang di miliki daerah melalui strategi kebijakan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui alokasi belanja modal, baik di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Indonesia.

2. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data sekunder berupa data *time series* tahun 2009-2017 dan *cross-section* berupa 13 kabupaten dan 1 kota diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Sampel berupa data panel sebanyak 126 sampel yang diolah menggunakan bantuan program IBM SPSS Version 25.0.

Adapun model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log PAD}_{it} + \beta_2 \text{Log DBH} + \beta_3 \text{Log DAU}_{it} + \beta_4 \text{Log DAK}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

- BM = variabel belanja modal (rupiah)
- PAD = variabel pendapatan asli daerah (rupiah)
- DBH = variabel dana bagi hasil (rupiah)
- DAU = variabel dana alokasi umum (rupiah)
- DAK = variabel dana alokasi khusus (rupiah)
- β_0 = konstanta
- β_1, β_2 = koefisien regresi
- i = kabupaten/kota
- t = tahun
- ε = kesalahan residual (*error term*)

Berdasarkan persamaan tersebut, disusun ke dalam suatu formula yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4$$

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, dengan melakukan uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi dan analisis regresi berganda (*multiple regression*) untuk pengujian hipotesis dengan melakukan uji t, uji F dan uji determinasi atau *R Square*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

Tahap pertama dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05. Data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi >0,05. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pendapatan asli daerah (0,170), dana bagi hasil (0,183), dana alokasi umum (0,200), dana alokasi khusus (0,065), dan belanja modal (0,127) secara berturut-turut. Karena nilai signifikansi seluruh variabel penelitian >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian adalah berdistribusi normal.

Tahap kedua dalam uji asumsi klasik adalah uji multikolinearitas yang digunakan untuk mengetahui ada

atau tidaknya penyimpangan klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak terdapat multikolinearitas. Dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) pada model regresi. Jika nilai VIF lebih besar dari 5, maka variabel penelitian mempunyai persoalan multikolinearitas, sedangkan apabila lebih kecil dari 5 tidak terjadi persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel pendapatan asli daerah (2,183), dana bagi hasil (1,574), dana alokasi umum (3,576), dana alokasi khusus (1,604) lebih kecil dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persoalan multikolinearitas pada masing-masing variabel bebas.

Tahap ketiga dalam uji asumsi klasik adalah uji heterokedastisitas yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua variabel penelitian pada model regresi. Model regresi yang baik tidak terdapat heterokedastisitas. Dalam penelitian ini Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan Uji Park yaitu dengan meregresikan nilai residual ($\text{Ln}e^2$) dengan masing-masing variabel bebas ($\text{Ln}X_1$ dan $\text{Ln}X_2$). Hasil Uji Heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai t hitung masing-masing variabel pendapatan asli daerah (1,666), dana bagi hasil (0,128), dana alokasi umum (-0,741), dana alokasi khusus (1,424) yang berada di antara $-T \text{ Tabel} \leq T \text{ Hitung} \leq T \text{ Tabel}$ atau $-1,979 \leq T \text{ Hitung} \leq 1,979$, maka H_0 diterima. Artinya dari hasil pengujian antara $\text{Ln}e^2$ dengan $\text{Ln}X_1$, $\text{Ln}X_2$, $\text{Ln}X_3$, dan $\text{Ln}X_4$, tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Tahap keempat dalam uji asumsi klasik adalah uji autokorelasi yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Dalam penelitian ini Uji Autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan bila DW terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Hasil Uji Autokorelasi variabel bebas (pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) terhadap variabel terikat (belanja modal) adalah sebesar 0,933 yang berada diantara -2 sampai +2. Artinya bahwa seluruh variabel bebas tidak mengalami autokorelasi. Secara umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi seluruh variabel yang di uji dalam model regresi tidak mengalami permasalahan asumsi klasik, sehingga model yang digunakan dapat digunakan untuk analisis regresi.

3.2 Analisis Regresi Berganda (Pengujian Hipotesis)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda (*multiple regression*). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap variabel belanja

modal di Propinsi Kalimantan Tengah dalam periode tahun 2009-2017.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kajian empiris sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal
- H2 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara dana bagi hasil terhadap belanja modal
- H3 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal
- H4 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal
- H5 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap belanja modal

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda (*multiple regression*) dari output SPSS di peroleh hasil yang di buat ke dalam suatu model persamaan sebagai berikut:

$$BM = 0,390 - 0,183PAD + 0,353DBH + 0,282DAU + 0,457DAK$$

t hitung : (-1,001) (2,543)* (3,973)* (5,341)*

t tabel : 1,979

F hitung : (47,792)*

F tabel : 3,069

R2 : 0,612 = 61,21%

Significance at level 5%

Sumber: Output SPSS, 2019

3.3 Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau dikenal juga dengan uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung pada Tabel *Coefficients*. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai t hitung (-1,001) > dari nilai t tabel (1,979) dengan nilai signifikansi 0,319 > signifikansi 0,05. Artinya bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan ada pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, ditolak. Sedangkan, variabel dana bagi hasil (X_2) memiliki nilai t hitung (2,541) > dari nilai t tabel (1,979) dengan nilai signifikansi 0,012 < signifikansi 0,05. Artinya bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan ada pengaruh antara variabel dana bagi hasil terhadap belanja modal, diterima. Variabel dana alokasi umum (X_3) memiliki nilai t hitung (3,975) > dari nilai t tabel (1,979) dengan nilai signifikansi 0,000 < signifikansi 0,05. Artinya bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan ada pengaruh antara variabel dana alokasi umum terhadap belanja modal, diterima. Demikian juga dengan variabel

dana alokasi khusus (X_4) memiliki nilai t hitung (5,341) > dari nilai t tabel (1,979) dengan nilai signifikansi $0,000 <$ signifikansi $0,05$. Artinya bahwa hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan ada pengaruh antara variabel dana alokasi khusus terhadap belanja modal, diterima.

3.4 Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau dikenal juga dengan uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi menunjukkan hasil uji F yang dapat dilihat dalam Tabel ANOVA dalam kolom Signifikansi. Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung (47,792) > dari nilai F tabel (3,069) dengan signifikansi F ($0,000 <$ signifikansi $0,05$). Artinya bahwa hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan ada pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap belanja modal, diterima.

3.5 Uji Determinasi (R^2 Square)

Uji determinasi dalam regresi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai rentang interval antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R^2 semakin mendekati angka 1, berarti persentase sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sangat kuat. Berdasarkan hasil analisis regresi dari output SPSS diperoleh nilai R^2 (R^2 Square) sebesar 0,612 atau sebesar 61,2%. Artinya sumbangan pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap belanja modal adalah sebesar 61,2%, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

3.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2009-2017. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap alokasi belanja modal di wilayah ini. Fakta ini dapat dipengaruhi oleh kecenderungan pendapatan asli daerah yang menunjukkan trend menurun dari Rp. 1,253 Triliun (2014), menjadi Rp. 1,174 Triliun (2015) dan Rp. 1,154 Triliun (2016) secara berturut-turut sehingga dapat berpengaruh terhadap penurunan alokasi belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu diperlukan upaya konkret untuk dapat menggali sumber-sumber penerimaan baru sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama yang bersumber dari hasil pajak

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3.7 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2009-2017. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dana bagi hasil akan berkontribusi besar terhadap peningkatan alokasi belanja modal di wilayah ini. Secara teoritis, dana bagi hasil yang bukan bersumber dari pendapatan asli daerah dan merupakan bagian dari dana transfer pusat, selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, apabila semakin besar alokasinya, maka pemerintah daerah akan mampu menetapkan alokasi belanja modal yang semakin besar pula, demikian juga sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika alokasi anggaran dana perimbangan semakin kecil. Selain itu, fakta empiris di lokasi penelitian yang menunjukkan alokasi dana bagi hasil yang menunjukkan trend meningkat dalam waktu dua tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 320,2 Milyar (2015), menjadi Rp. 342,8 Milyar (2016), dan Rp. 372,4 Milyar (2017) secara berturut-turut sehingga berpengaruh terhadap peningkatan alokasi belanja modal.

3.8 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2009-2017. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi umum akan berkontribusi besar terhadap peningkatan alokasi belanja modal di wilayah ini. Secara teoritis, dana alokasi umum yang bukan bersumber dari pendapatan asli daerah dan merupakan bagian dari dana transfer pusat, selain dana bagi hasil dan dana alokasi khusus, apabila semakin besar alokasinya, maka pemerintah daerah akan mampu menetapkan alokasi belanja modal yang semakin besar pula, demikian juga sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika alokasi anggaran dana perimbangan semakin kecil. Selain itu, fakta empiris di lokasi penelitian yang menunjukkan jumlah dana alokasi umum yang menunjukkan trend meningkat dalam waktu sembilan tahun terakhir yaitu dari Rp. 694,8 Milyar (2009) menjadi Rp. 1,574 Triliun (2017) sehingga berpengaruh terhadap peningkatan alokasi belanja modal.

3.9 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2009-2017. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi khusus akan berkontribusi besar terhadap peningkatan

alokasi belanja modal di wilayah ini. Secara teoritis, dana alokasi khusus yang bukan bersumber dari pendapatan asli daerah dan merupakan bagian dari dana transfer pusat, selain dana bagi hasil dan dana alokasi umum, apabila semakin besar alokasinya, maka pemerintah daerah akan mampu menetapkan alokasi belanja modal yang semakin besar pula, demikian juga sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika alokasi anggaran dana perimbangan semakin kecil. Selain itu, fakta empiris di lokasi penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah dana alokasi khusus yang menunjukkan trend meningkat dalam waktu tiga tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 61,92 Milyar (2014), menjadi Rp. 72,52 Milyar (2015), Rp. 241,2 Milyar (2016), dan Rp. 641,5 Milyar (2017) secara berturut-turut sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya alokasi belanja modal. Meskipun dana alokasi khusus memiliki porsi yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan lainnya, seperti dana bagi hasil dan dana alokasi umum tetapi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan alokasi belanja modal untuk pelayanan publik.

3.10 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009-2017. Peningkatan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan alokasi belanja modal. Peningkatan pendapatan asli daerah sebagai bentuk kemandirian daerah dalam menggali potensi dan sumber penerimaannya serta adanya tambahan penerimaan daerah yang berasal dari transfer dana pusat berupa dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus akan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam mengalokasikan belanja modal untuk penyediaan layanan publik. Selain itu, meskipun alokasi pendapatan asli daerah menunjukkan trend yang fluktuatif, tetapi penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus menunjukkan trend meningkat dalam kurun 2015-2017 secara bersama-sama mampu meningkatkan alokasi belanja modal untuk belanja publik di Provinsi Kalimantan Tengah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan seperti diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian. Secara parsial, variabel pendapatan asli daerah tidak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2009-2017. Secara simultan, variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2009-2017. Implikasi dan saran penulis adalah diperlukan suatu strategi kebijakan dan inovasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan baru sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, A., 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2007. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(1), 51-60.
- Aditiya, N.Y. and Dirgantari, N., 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 42-56.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya.
- Banga, W., 2017. Administrasi keuangan negara dan daerah. *Bogor: Ghalia Indonesia*.
- Jannah, R., Wahono, B. and Salim, M.A., 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009-2015). *Jurnal Warta Ekonomi*, 6(01), 123-131.
- Kholidi, A., Zamzani, H., Machpudin, A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2014). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Universitas Jambi*. 2(1), 59-76.
- Juniawan, M.A. and Suryantini, N.P.S., 2018. Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 7(3), pp.1255-1281.
- Rifai, R.A., 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi

- Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(7), 169-180.
- Sari, N., 2018. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sari, D.M.M.Y. and Wirama, D.G., 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), pp.2065-2087.
- Sudrajat, M.A. and Purniawati, I.D., 2018. Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), pp.56-66.
- Suryana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. 9(2), 67-74.